

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan reproduksi menurut *World Health Organization* (WHO) adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-prosesnya (WHO, 2006).

World Health Organization tahun 1997 menyampaikan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi memerlukan kemampuan beradaptasi dan berperilaku positif pada diri seseorang dalam mengatasi tantangan dan kebutuhan hidup sehari-hari secara efektif. Hal ini disebut dengan proses kemampuan *Life Skill* (Direktorat Sekolah Dasar, 2020).

Kesehatan reproduksi merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi setiap orang kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari kesejahteraan wanita dewasa. Menjaga kesehatan organ reproduksi bukan hanya tentang kesuburan, tetapi juga tentang kenyamanan, kebersihan, dan mencegah berbagai masalah seperti infeksi atau gangguan hormonal (Deviana Pratiwi Munthe, 2024).

Di masa kini, banyak perempuan menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, mulai dari gangguan menstruasi seperti amenore, dismenore, dan sindrom premenstruasi yang kerap mengganggu aktifitas sehari-hari, hingga masalah infertilitas yang muncul akibat gangguan ovulasi atau sindrom ovarium polikistik (PCOS). Tidak hanya itu, penyakit menular seksual seperti klamidia, gonore, dan HIV/AIDS masih menjadi ancaman serius, terutama bagi mereka yang kurang mendapatkan edukasi tentang seks yang aman. Masalah kehamilan pun tidak bisa diabaikan, karena ada perempuan yang harus menghadapi kehamilan berisiko tinggi atau komplikasi yang bisa membahayakan ibu dan janin. Belum lagi kanker serviks dan kanker ovarium, dua penyakit ini sering kali muncul tanpa gejala awal yang jelas, tapi bisa berdampak fatal. Seiring

bertambahnya usia, wanita juga akan menghadapi menopause dan berbagai perubahan hormonal, yang bisa menyebabkan masalah seperti osteoporosis atau gangguan metabolisme (Khadijah & Palifiana Arthyka, 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi bermacam-macam seperti faktor sosial ekonomi dan demografi yang harus tercukupi karena mempengaruhi kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, dan tempat tinggal di daerah terpencil.

Pencegahan dengan gaya hidup sehat, pola makan seimbang, kebersihan yang baik, serta pemeriksaan rutin dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu, memahami tubuh sendiri dan mengenali tanda-tanda jika ada masalah juga sangat penting (Pratiwi Munthe, 2024).

Pada peraturan pemerintah Indonesia undang-undang nomor 61 tahun 2014, pasal 1 berisi pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan Kesehatan reproduksi, baik dalam hal pencegahan, deteksi dini, maupun pengobatan. Dengan pemahaman yang lebih baik, setiap Wanita bisa menjaga kesehatannya dan menjalani hidup dengan lebih nyaman dan percaya diri.

Sama halnya di dalam lapas, kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, termasuk bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan. Dalam konteks lapas perempuan, kondisi yang penuh keterbatasan seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi. Hal ini mencakup kurangnya akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang memadai, serta ketersediaan fasilitas khusus, seperti pembalut, ruang kesehatan, dan pelayanan persalinan bagi narapidana hamil (Kresnadari *et al.*, 2022).

Di Indonesia, data tentang perempuan hamil di penjara masih sedikit. Jumlah perempuan yang dipenjara naik 1.807 orang pada tahun 2000 menjadi 11.465 orang pada tahun 2017. Dari 464 lapas dan rutan yang ada di tahun 2016, hanya 10 yang khusus untuk perempuan. Menurut data kemenkumham RI per Desember 2017, dari 507 lapas/rutan, 49% diantaranya melaporkan ada 56 ibu hamil di dalam tahanan, karena jumlahnya sedikit, keberadaan mereka sering terabaikan. Walaupun hukum di Indonesia sudah mengatur hak-hak perempuan di penjara, masih dilihat apakah hak-hak tersebut benar terpenuhi. Keterbatasan sumber daya dan kondisi penjara yang penuh sering membuat kebutuhan perempuan di dalam tahanan tidak terpenuhi (Febe, 2019).

Narapidana perempuan menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas lapas. Kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan kesehatan dan kebutuhan sosial yang berbeda, sehingga fasilitas, program dan pelayanan lapas harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan (Aisyaroh, 2022).

Kondisi lapas yang sering mengalami kelebihan kapasitas juga memperburuk masalah kesehatan reproduksi, termasuk kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti pembalut. Hal ini menciptakan potensi konflik antar narapidana, yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kesehatan mereka (Latifah, 2019).

Warga binaan perempuan mempunyai kebutuhan khusus karena resiko terjadinya masalah kesehatan yang cukup besar, sehingga perlu perhatian akan kebutuhan kesehatan. Masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada warga binaan perempuan adalah penyakit infeksi menular seksual. Perempuan lebih besar risikonya daripada laki-laki untuk mengalami infeksi menular seksual. Beberapa infeksi menular seksual yang sering terjadi saat masuk atau selama di penjara antara lain Chlamydia, gonorrhea, syphilis dan HIV.

Di negara Romania kelompok populasi umum memiliki rata rata 39,37 tahun, mayoritas adalah perempuan (63,89%) dan berasal dari daerah perkotaan, terutama Bucharest (38,33%) dan Timisoara (28,16%). Kelompok

narapidana rata-rata berusia 41,66 tahun dan mayoritas adalah laki-laki (92,78%) dari Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Jilava. Sebanyak 55 narapidana (56,7%) memiliki tes HIV positif, 49 orang (50,51%) positif HCV, dan 30 orang (30,92%) memiliki kedua infeksi tersebut. Rata-rata Usia narapidana dengan HIV adalah 41,12 tahun, sedangkan yang memiliki HCV rata-rata berusia 39,3 tahun (Sultana *et al.*, 2024).

Dari berbagai negara prevalensi IMS dan faktor terkait pada narapidana terutama di negara Indonesia berjenis kelamin wanita dengan rata-rata umur kurang lebih 33 tahun, dibagi menjadi 2 status, sudah menikah mereka rata-rata tidak memiliki edukasi, positif alkohol, dan 55 % melakukan seksual yang tidak aman. Tidak hanya itu mereka juga 3.7% positif HIV, 7.0 positif sipilis, 3.3 % positif HBV, 2.3% positif HCV. Bagi yang belum menikah mereka sudah memiliki edukasi yang baik (Sultana *et al.*, 2024).

Hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku seksual warga binaan yang berisiko terkena IMS sangatlah penting bahwa orang dengan pendidikan tinggi yang terlibat dalam perilaku seksual berisiko lebih besar dibandingkan orang dengan pendidikan rendah. Dari hasil uji statistik yang berarti bahwa narapidana dengan pendidikan lebih tinggi justru lebih berisiko dalam perilaku seksual dan berisiko terhadap IMS (Nugrahani *et al.*, 2021).

Hubungan tingkat stres dengan perilaku seksual warga binaan yang berisiko terkena IMS. Menunjukkan bahwa tahanan dengan tingkat stres tinggi terlibat dalam perilaku seksual berisiko pada warga binaan. Tahanan dengan stress tinggi, 87.7 % melakukan perilaku seksual berisiko, sedangkan 16,3% tidak. Sementara itu, dari 51 tahanan dengan stress rendah, hanya 58,8 yang berperilaku seksual berisiko, dan 41,2 lainnya tidak (Nugrahani *et al.*, 2021).

Penghuni penjara rentan mengalami stres karena tekanan dari lingkungan penjara. Stres yang berkepanjangan bisa melemahkan kemampuan seseorang dalam mengatasi tekanan, meningkatkan risiko penyakit menular (Nugrahani *et al.*, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Lapas Pondok Bambu untuk melihat apakah Warga Binaan Perempuan memiliki keterbatasan akses pada kesehatan reproduksi. Karena banyak dari perempuan di lapas tidak mendapatkan fasilitas yang lengkap, seperti IMS, HIV/AIDS, keputihan dan masalah gangguan menstruasi, atau adanya edukasi kesehatan reproduksi. Selain itu kondisi di lapas yang melebihi kapasitas juga dapat terjadi penularan infeksi menular seksual dan juga minimnya tenaga medis, dapat memperburuk kesehatan mereka. Dengan meneliti masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi Warga Binaan Perempuan.

Maka diperlukan pendekatan strategis untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan pelatihan bagi petugas lapas, dan penyediaan program pendidikan reproduksi yang berkesinambungan. Melalui upaya ini, diharapkan hak kesehatan reproduksi WBP perempuan dapat dipenuhi secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perlu diidentifikasi bagaimana gambaran masalah kesehatan reproduksi dan penanganan kesehatan reproduksi yang tersedia di Lapas Perempuan untuk kebutuhan IMS, HIV/AIDS, masalah keputihan, gangguan menstruasi dan cara penanganannya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana gambaran permasalahan kesehatan reproduksi warga binaan masyarakat di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu?
- 2) Bagaimana gambaran penanganan yang dilakukan warga binaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan kesehatan reproduksi selama berada di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu?
- 3) Apakah terdapat hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi HIV/AIDS & IMS terhadap penanganan warga binaan masyarakat di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu?

- 4) Apakah terdapat hubungan gangguan menstruasi terhadap penanganan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu?
- 5) Apakah terdapat hubungan riwayat keputihan terhadap penanganan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu?
- 6) Bagaimana tinjauan penanganan kesehatan reproduksi pada Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu menurut pandangan Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis bagaimana gambaran dan hubungan antara pengetahuan serta masalah kesehatan reproduksi dengan penanganan masalah kesehatan reproduksi pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Pondok Bambu kelas IIA.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengidentifikasi bagaimana gambaran permasalahan kesehatan reproduksi yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pondok Bambu Kelas IIA
- 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran penanganan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan dalam menghadapi permasalahan kesehatan reproduksi selama berada di Lapas Pondok Bambu Kelas IIA.
- 3) Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan kesehatan reproduksi mengenai HIV/AIDS dan IMS terhadap penanganan yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pondok Bambu Kelas IIA.
- 4) Untuk menganalisis hubungan antara gangguan menstruasi yang dialami terhadap penanganan yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pondok Bambu Kelas IIA.

- 5) Untuk menganalisis hubungan antara permasalahan keputihan yang dialami terhadap penanganan yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pondok Bambu Kelas IIA.
- 6) Untuk menganalisis penanganan kesehatan reproduksi pada Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu berdasarkan pandangan Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan reproduksi, khususnya pada lembaga pemasyarakatan.

1.5.2 Manfaat Aplikatif

Manfaat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan adalah membantu memastikan pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia, meningkatkan pengetahuan WBP perempuan mengenai kesehatan reproduksi dan cara menjaga kesehatan mereka.

Selain itu, memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas, layanan, dan kebijakan di lapas perempuan, membantu petugas memahami kebutuhan khusus WBP perempuan untuk mendukung peran mereka secara efektif. Bukan hanya itu, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, termasuk mereka yang berada dalam sistem pemasyarakatan.

1.5.3 Manfaat Metodologi

Penelitian ini bisa menjadi contoh bagi penelitian lain tentang Kesehatan reproduksi di lapas. Selain itu, penelitian ini membantu menemukan cara yang lebih mudah dan tepat dalam mengumpulkan serta memahami data.